

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii - v
Abstrak.....	vii - xv
Peran DPR dalam Menjalankan Kontrol Demokratis atas Pembaruan Sektor Keamanan <i>Oleh: Poltak Partogi Nainggolan.....</i>	1 - 44
Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia: Berbagai Permasalahannya <i>Oleh: Indra Pahlevi.....</i>	45 - 72
Menimbang Calon Perseorangan dalam Pemilu Presiden <i>Oleh: Prayudi.....</i>	73 - 95
Model Kaderisasi PDIP dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2009 <i>Oleh: Aryojati Ardipandanto.....</i>	97 - 125
Penguatan Paradigma Desentralisasi dalam Pengaturan Mengenai Pegawai Negeri Sipil <i>Oleh: Riris Katharina.....</i>	127 - 146
Politik Pangan Di Era Globalisasi <i>Oleh: Adirini Pujayanti.....</i>	147 - 171
Peluang Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat Pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif <i>Oleh: Lisbet.....</i>	173 - 195
Biodata Penulis & Mitra Bestari	
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Politica merupakan jurnal ilmiah yang konsisten untuk menyajikan berbagai permasalahan strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional yang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Edisi kedua pada Tahun 2011 ini, *Jurnal Politica* menyajikan 7 (tujuh) tulisan yang merupakan hasil kajian di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional.

Tulisan pertama berjudul “Peran DPR dalam Menjalankan Kontrol Demokratis atas Pembaruan Sektor Keamanan” ditulis oleh Poltak Partogi Nainggolan. Pada jurnal ini, penulis membahas gerakan reformasi tidak hanya telah berhasil menjatuhkan rejim otoriter Soeharto, tetapi juga tuntutan untuk perbaikan peran parlemen dan militer. Sebagai bagian dari transisi demokratis, upaya reformasi kedua institusi negara itu telah dimulai dengan amandemen konstitusi. DPR kemudian muncul sebagai ‘*superbody*,’ dan tekanan untuk menuntaskan reformasi sektor keamanan terus berlanjut. Penulis menilai posisi parlemen yang kuat itu secara realistis belum dapat mendorong reformasi sektor keamanan secara komprehensif dan signifikan sebagaimana yang diaspirasikan gerakan reformasi selama ini.

“Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya” adalah judul tulisan kedua yang ditulis oleh Indra Pahlevi. Bahwa dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia, Pemilu merupakan instrumen untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Guna menghasilkan sebuah pemilu berkualitas, dibutuhkan lembaga profesional yang mengelola pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu profesional di Indonesia sudah diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (5) Konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Namun demikian berkaca pada evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 2009, terdapat banyak masalah penyusunan daftar pemilih hingga penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Beberapa permasalahan tersebut akibat integritas dan kemampuan para komisioner yang rendah selain belum sinkronnya pengaturan tentang ke-pemilu-an yang masih tersebar. Tulisan ini merekomendasikan agar semua pengaturan tentang pemilu harus sinkron dan salah satunya bisa dilakukan integrasi pengaturan secara komprehensif tentang pemilu dalam satu undang-undang.

Prayudi sebaga penulis ketiga dalam jurnal ini, menyajikan tulisan dengan judul “Menimbang Calon Perseorangan dalam Pemilu Presiden.” Salah satu materi muatan amandemen konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah tentang calon perseorangan pemilu Presiden. Penulis menilai usulan ini cenderung merefleksikan penilaian publik terhadap peran partai dalam nominasi bakal pasangan calon sebelum menjadi pasangan calon definitif presiden dan wakil presiden ditahap berikutnya. Dominasi partai membawa akibat tidak hanya kesan oligarki elit dan kepentingan partisannya masing-masing, tetapi juga diwarnai oleh dugaan transaksi politik uang.

“Model Kaderisasi PDIP dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2009” adalah judul tulisan keempat dalam jurnal ini yang ditulis oleh Aryojati Ardipandanto. Penulis menganalisis dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2009, PDIP menjalankan metode kaderisasi yang menekankan pada aspek ideologis Partai. Namun pada pelaksanaannya, hal ini tidak didukung oleh pemberian muatan atau materi kaderisasi yang memperhatikan peningkatan kualitas dan kapabilitas individu kader PDIP itu sendiri, terutama dalam hal kepemimpinan, kedisiplinan, militansi, dan loyalitas. Hal ini juga mengindikasikan masih adanya perbedaan pandangan mengenai muatan-muatan yang perlu diberikan dalam setiap program kaderisasi Partai di antara para pengambil keputusan tertinggi PDIP.

Tulisan kelima berjudul “Penguatan Paradigma Desentralisasi Dalam Pengaturan Mengenai Pegawai Negeri Sipil” ditulis oleh Riris Katharina. Berbagai permasalahan yang timbul akibat beberapa kekeliruan dalam pengaturan mengenai PNS, antara lain PNS tidak netral, jumlah dan struktur PNS di daerah menjadi tidak terkendali, kualitas PNS daerah sangat bervariasi antara daerah yang satu dan daerah lainnya, serta manajemen kepegawaian di daerah yang memerlukan banyak pembenahan. Tulisan ini mengemukakan bahwa paradigma desentralisasi masih tetap menjadi pilihan terbaik dengan berbagai perbaikan terhadap peraturan yang mengatur mengenai PNS.

Penulis keenam dalam jurnal ini yaitu Adirini Pujayanti, menyajikan tulisan dengan judul “Politik Pangan di Era Globalisasi.” Krisis pangan dapat mempengaruhi instabilitas keamanan nasional dan pada akhirnya berpengaruh pula pada stabilitas keamanan dunia. Negara yang memiliki ketahanan pangan mempunyai posisi yang lebih baik dalam politik internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mandiri mencukupi kebutuhan pangan nasionalnya, jika tidak ingin masuk dalam perangkap pangan negara maju di era perdagangan bebas saat ini.

Tulisan ketujuh sebagai tulisan terakhir dalam jurnal edisi ini berjudul “Peluang Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat Pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif” ditulis oleh Lisbet. Meski hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat telah terbina sejak Indonesia merdeka, akan tetapi, hubungan bilateral tersebut tidak selalu terjalin erat. Hubungan ini bahkan memburuk pada waktu Kongres Amerika Serikat menetapkan embargo kepada Indonesia terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Timor Timur. Pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif pada tahun 2010 diharapkan hubungan kedua negara akan semakin baik dan saling menguntungkan. Kedua belah pihak menyepakati Perjanjian Kemitraan Komprehensif dengan tujuan meningkatkan hubungan terutama pada bidang perdagangan dan keamanan karena kedua pihak memiliki ketergantungan pada kedua bidang tersebut.

Pada tataran konseptual, tulisan-tulisan dalam Jurnal ini diharapkan dapat menjembatani interaksi berbagai konsep dan teori dengan realita yang terkait dengan masalah di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional., sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas keilmuan. Sedangkan pada tataran praktis, berbagai masalah, data, konsep dan teori serta analisis dalam tulisan-tulisan di Jurnal ini, diharapkan mampu menjadi referensi pelengkap bagi Anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta kepada masyarakat pada umumnya. Redaksi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada DR. Lili Romli, M.Si., Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI dan DR. Ganewati Wuryandari, MA, Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sebagai Mitra Bestari, atas koreksi dan masukan-masukannya terhadap semua tulisan dalam edisi kedua Jurnal *Politica* ini.

Jakarta, Mei 2011

Redaksi

Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Nainggolan, Poltak Partogi

Peran DPR dalam Menjalankan Kontrol Demokratis atas Pembaruan Sektor Keamanan

Gerakan reformasi tidak hanya telah berhasil menjatuhkan rejim otoriter Soeharto, tetapi juga tuntutan untuk perbaikan peran parlemen dan militer. Sebagai bagian dari transisi demokratis, upaya reformasi kedua institusi negara itu telah dimulai dengan amandemen konstitusi. DPR kemudian muncul sebagai 'superbody,' dan tekanan untuk menuntaskan reformasi sektor keamanan terus berlanjut. Studi ini menilai bahwa posisi parlemen yang kuat itu secara realistis belum dapat mendorong reformasi sektor keamanan secara komprehensif dan signifikan sebagaimana yang diaspirasikan gerakan reformasi selama ini.

Kata Kunci: peran DPR, kontrol demokratis, pembaruan sektor keamanan

Nainggolan, Poltak Partogi

Democratic Control of the Parliament over the Military on Security Sector Reform

Reform movement has not only brought down the Soeharto authoritarian regime but also strengthened Indonesian people's pressure for better military reform and parliamentary role. As parts of democratic transition, the reforms of both state institutions started with the amendments of constitution. Afterward, DPR becomes a 'superbody,' and the pressure for security sector reform (SSR) was further conducted. These studies revealed that parliament's strong position still, however, in reality could not comprehensive- and significantly push SSR as has been previously voiced by the reform movement.

Keywords: DPR role, democratic control, security sector reform

Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Pahlevi, Indra

Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia:
Berbagai Permasalahannya

Dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia, Pemilu merupakan instrumen untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Guna menghasilkan sebuah pemilu berkualitas, dibutuhkan lembaga profesional yang mengelola pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu profesional di Indonesia sudah diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (5) Konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya lembaga penyelenggara pemilu harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya. Saat ini masih terdapat UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu disertai tugas dan wewenangnya. Namun demikian berkaca pada evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 2009, terdapat banyak masalah penyusunan daftar pemilih hingga penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Beberapa permasalahan tersebut akibat integritas dan kemampuan para komisioner yang rendah selain belum sinkronnya pengaturan tentang kepemilu-an yang masih tersebar. Tulisan ini merekomendasikan agar semua pengaturan tentang pemilu harus sinkron dan salah satunya bisa dilakukan integrasi pengaturan secara komprehensif tentang pemilu dalam satu undang-undang. Revisi terbatas atau penggantian terhadap UU No. 22 Tahun 2007, harus dijadikan sasaran antara untuk sasaran utamanya menciptakan sebuah pengaturan tentang pemilu yang baik.

Kata Kunci: Pemilu, Penyelenggara Pemilu, Undang-undang

Pahlevi, Indra

The General Election Committees in Indonesia: Problems Arising

As Indonesia is a democratic state, general election is a means to run the people sovereignty. To achieve a qualified election, we need a professional institution there on. Such a professional institution has been conducted by the Constitution 1945, Article 22E section (5) as saying that the election is held by a national election commission, which is permanent and autonom. The provision underlines that such an institution shall be free from any form of intervention and from whatever parties, in conducting its all tasks, function and authorities. Today there has been the law No. 22/2007 on The Election Organizer ruling the National Election Commission, Election Oversight Body and its their function and authorities. However, referring to the evaluation of the election in 2009, there have been many problem arising from organizing, tentative eligible voters, the seats allocation to the determination for the elected legislators. The main reason for such problems count for both doubtedness of the integrity and capacity of the commissioners and unsincronized electoral legal frameworks. Therefore, there shall be a concrete effort to organise an election through a more comprehensive codified legal frameworks. Partial amandement of the Law No. 22/2007 shall be viewed as an intervening goal to achieve a comprehensive electoral legal frameworks.

Keywords : General Election, Election Organizer, Law

Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Prayudi

Menimbang Calon Perseorangan dalam Pemilu Presiden

Salah satu materi muatan amandemen konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah tentang calon perseorangan pemilu Presiden. Usulan ini cenderung merefleksikan penilaian publik terhadap peran partai dalam nominasi bakal pasangan calon sebelum menjadi pasangan calon definitif presiden dan wakil presiden ditahap berikutnya. Dominasi partai membawa akibat tidak hanya kesan oligarki elit dan kepentingan partisannya masing-masing, tetapi juga diwarnai oleh dugaan transaksi politik uang.

Kata Kunci: Calon Perseorangan, Pemilu Presiden, Partai atau Gabungan Partai Politik, Amandemen UUD 1945, DPD, MPR

Prayudi

Considering Independent Candidates in the Presidential Election

One of a proposal constitution amendment initiative by The Council of Regional Representative (DPD's) is about the independent candidate of presidential election. These proposal tend to reflect of public assessment over a parties role in the nomination every pairs of pre-candidate process before on the next stages become the candidate of President and Vice President definitive. The parties domination is not only presenting an impact of elite oligarchy and their particular interest impression, but also colored by an assumption on money politics transaction.

Keywords: Independent Candidate, Presidential Elections, Party or Coalition of Parties, Constitution Amandment, The Council of Regional Representative, Peoples Consultative Assembly

Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Ardipandanto, Aryojati

Model Kaderisasi PDIP dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2009

Dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2009, PDIP menjalankan metode kaderisasi yang menekankan pada aspek ideologis Partai, namun ternyata hal ini tidak didukung oleh pemberian muatan atau materi kaderisasi yang memperhatikan peningkatan kualitas dan kapabilitas individu Kader PDIP itu sendiri, terutama dalam hal kepemimpinan, kedisiplinan, militansi, dan loyalitas. Hal ini juga mengindikasikan masih adanya perbedaan pandangan mengenai muatan-muatan yang perlu diberikan dalam setiap program kaderisasi Partai di antara para pengambil keputusan tertinggi PDIP.

Kata Kunci : Kaderisasi, PDIP, Pemilu Legislatif 2009

Ardipandanto, Aryojati

PDIP's Cadre Formation Model in Facing the 2009 Legislative Elections

Facing Legislative Election 2009, PDIP practices kaderization method that emphasizing the aspect of Party ideology, but as a matter of fact this is not supported by giving substance or matter of kaderization that giving attention to increasing quality and capability of each Cader of PDIP itself individually, especially in circumstances of leadership, disipline, militancy, and loyalty. This indicates as well there is still a difference of point of view among the Party Leaders in the matter of substances which are needed to be given in each Party kaderization programs.

Keywords : Caderization, PDIP, Legislative Election 2009

Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Katharina, Riris

Penguatan Paradigma Desentralisasi dalam Pengaturan Mengenai Pegawai Negeri Sipil

Permasalahan yang timbul sebagai akibat penerapan prinsip desentralisasi dalam pengaturan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat ini telah menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Indonesia. Berbagai permasalahan yang timbul akibat beberapa kekeliruan dalam pengaturan mengenai PNS, antara lain PNS tidak netral, jumlah dan struktur PNS di daerah menjadi tidak terkendali, kualitas PNS daerah sangat bervariasi antara daerah yang satu dan daerah lainnya, serta manajemen kepegawaian di daerah yang memerlukan banyak pembenahan. Tulisan ini mengemukakan bahwa paradigma desentralisasi masih tetap menjadi pilihan terbaik dengan berbagai perbaikan terhadap peraturan yang mengatur mengenai PNS.

Kata kunci: PNS; Desentralisasi; Manajemen Kepegawaian

Katharina, Riris

Strengthening the Paradigm of the Decentralization in Regulating Civil Servants

Problems emerged from the implementation of decentralization of the civil servants (PNS) across the country is giving a serious threat to the central government. Some examples of problems caused by the wrongdoings of the practices of this decentralization policy are, among others, the inneutrality of the civil servants, their uncontrollable growing numbers and structure, their poor management and big gap of quality among many regions. This essay argues that decentralization paradigm is still a good choice for regulating civil servants in Indonesia but its implementing policies need improvements in many areas.

Keywords: Civil Services, Decentralization, Management Civil Services

Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Pujayanti, Adirini
Politik Pangan Di Era Globalisasi

Pangan merupakan komoditas penting karena secara langsung menentukan keberlangsungan hidup manusia. Saat ini rejim pangan murah telah berlalu, penyebabnya laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, sedangkan laju produksi pangan terus menyusut sebagai akibat lahan pertanian semakin berkurang dan perubahan iklim. Krisis pangan dapat mempengaruhi instabilitas keamanan nasional dan pada akhirnya berpengaruh pula pada stabilitas keamanan dunia. Negara yang memiliki ketahanan pangan mempunyai posisi yang lebih baik dalam politik internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mandiri mencukupi kebutuhan pangan nasionalnya, jika tidak ingin masuk dalam perangkap pangan negara maju di era perdagangan bebas saat ini.

Kata kunci : Politik pangan, globalisasi, ketahanan pangan, perdagangan internasional

*Pujayanti, Adirini
Food Policy in Globalization Era*

Food is an important commodity since it has a direct impact on human life. This paper argues that cheap food rezime has disappeared due to uncontrolled population growth while at the same time there is a decreasing production caused by the lessening land farming and global warming. Food crisis can affect instability of national security, which in turn implicates world peace. It also argues that a nation with a good food security policy has a better position in the international politics. Indonesia as a developing country has to stand on its own feet, if the country does not want to fall into the food trap of developed country on today's free trade era.

Keywords: Politics of food, globalization, food security, international trade

Kata kunci bersumber dari artikel.
Lembar ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya

Lisbet

Peluang Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat Pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif

Hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat telah terbina sejak Indonesia merdeka. Akan tetapi, hubungan bilateral tersebut tidak selalu terjalin erat. Hubungan ini bahkan memburuk pada waktu Kongres Amerika Serikat menetapkan embargo kepada Indonesia terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Timor Timur. Pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif pada tahun 2010 diharapkan hubungan kedua negara akan semakin baik dan saling menguntungkan. Kedua belah pihak menyepakati Perjanjian Kemitraan Komprehensif dengan tujuan meningkatkan hubungan terutama pada bidang perdagangan dan keamanan karena kedua pihak memiliki ketergantungan pada kedua bidang tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini hendak menganalisa mengenai pentingnya Indonesia bagi Amerika Serikat dan keuntungan apa yang diperoleh Indonesia pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif.

Kata kunci: peluang, Indonesia, Amerika Serikat, Perjanjian Kemitraan Komprehensif, perdagangan, keamanan

Lisbet

Opportunities to Increase Cooperation between Indonesia and the United States through the Comprehensive Partnership Agreement

Bilateral relations between Indonesia and The United State of America had been begun since the Indonesia's Dependence. But, the relations had not always been connected. They even got worse when The Congress of The United State of America imposed an embargo to Indonesia related to the chaos in East Timor. After The Comprehensive Partnership Agreement in 2010, both parties were hoping that they will convince to make a better and also mutually beneficial future. Both parties have decided to develop the Comprehensive Partnership Agreement in order to enhance the relations especially in trade and security issues because both of the countries have the interdependence in both issues. Because of that, this paper will analyze about the importance of Indonesia to the United States of America and the beneficial to Indonesia after the Comprehensive Partnership Agreement.

Keywords: Opportunity, Indonesia, United State of America, Comprehensive Partnership Agreement, Trade, Security

